



**ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI, PERTUMBUHAN
PENERIMAAN REALISASI, DAN PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA PALEMBANG**

M. Thoyib¹
Bainil Yuliana²
M. Reynaldi Dwi Saputra³
Riza Wahyudi⁴
Darul Amri⁵

thoyibm12@gmail.com
byulina@gmail.com
reynaldid7@gmail.com
rizawahyudi@gmail.com
darulaamri@gmail.com

Politeknik Negeri Sriwijaya

Article Info

Kata Kunci :
Efficiency, Effectiveness,
Contribution, Revenue
Growth, Taxpayer Growth,
Rural and Urban Land and
Building Tax (PBB-P2),
and Regional Original Income
(PAD)

Abstract

This study was conducted to determine the factors that influence the receipt of the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) on Regional Original Income in Palembang City. The factors studied are efficiency, effectiveness, contribution, growth of realized revenue, and growth of taxpayers partially and simultaneously. The sampling used in this study is the Saturated Sampling Technique method using secondary data from the Regional Government Financial Reports (LKPD) audited by the BPK and Land and Building Tax Realization Reports which are analyzed using multiple regression analysis with the help of Statistical Product Software for the Service Solution (SPSS) version 26 for windows. As a result, it is estimated that there is an effect of the independent variable on the dependent both partially and simultaneously. The coefficient with the highest effect on PAD is efficiency of 0.932 and the coefficient with the lowest effect is the revenue growth rate of 0.219. As much as 72.1% can be explained by independent variables and the remaining 27.9% is influenced by other factors not explained in this study.

M. Thoyib¹
Bainil Yuliana²
M. Reynaldi Dwi Saputra³
Riza Wahyudi⁴
Darul Amri⁵
thoyibm12@gmail.com

Jurnal Ilmiah Manajemen – Vol :10.02.2021

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk negara yang berkembang, yang memiliki pendapatan dari

berbagai sumber salah satunya yaitu berasal dari pemungutan pajak, baik pajak yang dipungut oleh pusat maupun pajak yang dipungut daerah yang menjadi sumber terbesar pendapatan negara. Meskipun pemungutan pajak merupakan sumber terbesar untuk pendapatan kas negara dalam proses pemungutannya tidak jarang mengalami kendala dan masalah seperti masalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pemungutan pajak, masalah kesadaran masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak yang bijak dengan membayar pajak kepada Negara.

Selama ini, penetapan target pajak dalam APBN selalu menggunakan asumsi makro. Seharusnya, target pajak dihitung dari pendekatan mikro seperti jumlah wajib pajak terdaftar, jumlah pembayar pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi. salah satu penyebabnya adalah masyarakat kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar, misalnya masih banyaknya jalan yang rusak dan sarana publik yang tidak memadai serta kasus korupsi yang kerap terjadi kepada pejabat eksekutif pemerintahan baik pusat atau pun daerah.

Masalah-masalah tersebut terjadi di seluruh daerah di Indonesia tidak terkecuali di kota Palembang. Kota Palembang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki potensi wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan sehingga di sini sektor pariwisata dan beberapa sektor terkait, misalnya sektor perdagangan dan penyediaan jasa, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa digali dan terus dikembangkan. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor.

Penghasilan terbesar yang diterima suatu daerah berasal dari pungutan pajak sehingga untuk dapat membiayai dan memajukan daerah tersebut dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar. Terkhususnya pajak bumi dan bangunan sesuai dengan kewajibannya. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan sendiri akan dikelola oleh pemerintah daerah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintah daerah menerima 90 persen hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga PBB dijadikan sarana yang efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD namun tidak membebani masyarakat adalah dengan cara menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai pajak daerah. Penerimaan dari pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu jenis pajak daerah Kabupaten/Kota yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan PAD di Kota Palembang yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Pasca pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara otomatis hasil dari pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 100% (seratus persen) masuk ke dalam kas daerah. Sehingga tidak ada lagi bagi hasil pajak kepada pemerintah pusat. Potensi penerimaan Pajak Daerah, salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan dapat berjalan lancar tergantung tingkat kepatuhan Pajak. Karena semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak, baik secara formal atau material, maka akan memperbesar basis pemajakan. Ini berakibat akan semakin besar penerimaan pajak yang

dapat dihimpun. Bertambahnya penduduk juga akan berdampak pada perluasan lahan perumahan karena adanya kebutuhan akan tempat tinggal. Hal ini akan menciptakan wajib pajak-wajib pajak baru, dimana masyarakat yang sebelumnya tidak ditetapkan sebagai wajib pajak pada akhirnya menjadi wajib pajak baru.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Komponen dari pendapatan daerah yaitu : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Adapun Tingkat kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari kontribusi PAD) terhadap Penerimaan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semakin tinggi proporsi PAD terhadap penerimaan daerah dalam APBD semakin baik tingkat kemandirian keuangannya dan semakin besar kemampuan keuangan suatu daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Penerimaan PAD salah satu berasal dari sektor pajak daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep dan Teori Efisiensi (X_1) Menurut Mahsun (2016:182) menurutnya “Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolute tetapi dalam bentuk relatif”. Unit A adalah lebih efisiensi dibanding unit B, unit A adalah lebih efisiensi tahun ini dibanding tahun lalu, dan seterusnya. Menurut Mardiasmo (2016:1) Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai output tertentu. Menurut Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti (2016:161) Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian diatas dapat disintesaikan menurut mahsun (2016:182) “Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolute tetapi dalam bentuk relatif”.

Konsep dan Teori Efektivitas (X_2) Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Menurut Mahsun (2016:182) “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Berdasarkan pengertian d atas dapat disintesaikan menurut Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output.

Konsep dan Teori Kontribusi (X_3) Menurut Halim (2016:94), kontribusi adalah sesuatu yang diberikan sebagai bentuk sumbangan Terhadap pendapatan asli daerah. Menurut Raudhatun Wardani dan Wida Fadhlia (2017:10) Kontribusi dapat di artikan sebagai sumbangan yang diberikan dari PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jika pemerintah dapat mengoptimalkan sumber penerimaan PBB P2 dan potensi penerimaannya semakin tinggi maka kontribusi terhadap pendapatan asli daerah akan meningkat.

Menurut Beni (2016: 136) kontribusi adalah untuk mengukur kemampuan daerah perlu ada kontribusi pendapatan asli daerah, dan apabila dalam tahun berjalan besar PAD menentukan untuk APBD pada tahun berikutnya, inilah kemampuan daerah yang sesungguhnya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disintesakan menurut Raudhatun Wardani dan Wida Fadhlia (2017:10) Kontribusi dapat di artikan sebagai sumbangan yang diberikan dari PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jika pemerintah dapat mengoptimalkan sumber penerimaan PBB P2 dan potensi penerimaannya semakin tinggi maka kontribusi terhadap pendapatan asli daerah akan meningkat.

Menurut Widodo (2016:35), Mengemukakan bahwa : Pertumbuhan adalah proses kenaikan penerimaan pajak dalam jangka panjang.

Menurut Kasmir (2016:107) adalah sebagai berikut: “Rasio pertumbuhan (Growth Ratio) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya.”

Menurut Halim (2016:135), mengemukakan bahwa: Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan pajak daerah baik target maupun realisasinya maka pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi guna menetapkan kebijakan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disintesakan menurut Menurut Halim (2016:135), mengemukakan bahwa: Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Menurut Wahyu, Maslichah dan Junaidi (2019:32) pertumbuhan wajib pajak adalah nilai terhadap banyaknya wajib pajak yang terdaftar berstatus secara aktif, untuk kewajiban perpajakannya di setiap tahunnya.

Menurut Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Menurut Thomas Sumarsan (2017:9) adalah: “Orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disintesakan menurut Wahyu, Maslichah dan Junaidi (2019:32) pertumbuhan wajib pajak adalah nilai terhadap banyaknya wajib pajak yang terdaftar berstatus secara aktif, untuk kewajiban perpajakannya di setiap tahunnya.

Konsep dan Teori Pertumbuhan Penerimaan Realisasi (X₄). Menurut Baldrice (2017:23) Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Kasmir (2016:107) adalah sebagai berikut: “Rasio pertumbuhan (Growth Ratio) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya.”

Menurut Halim (2016:135), mengemukakan bahwa: Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan pajak daerah baik target maupun realisasinya maka pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi guna menetapkan kebijakan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disintesis menurut Menurut Halim (2016:135), mengemukakan bahwa: Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Konsep dan Teori Pertumbuhan Wajib Pajak (X_5) Menurut Wahyu, Maslichah dan Junaidi (2019:32) pertumbuhan wajib pajak adalah nilai terhadap banyaknya wajib pajak yang terdaftar berstatus secara aktif, untuk kewajiban perpajakannya di setiap tahunnya.

Menurut Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Menurut Thomas Sumarsan (2017:9) adalah: “Orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disintesis menurut Wahyu, Maslichah dan Junaidi (2019:32) pertumbuhan wajib pajak adalah nilai terhadap banyaknya wajib pajak yang terdaftar berstatus secara aktif,

Konsep dan Teori Pendapatan Asli Daerah (Y) Menurut Carunia (2017:119) Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

Menurut Sahya Anggara (2016:326) adalah: “Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dihasilkan dari upaya daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber. Intensifikasi dilakukan pada sumber-sumber yang telah terbiasa ada di daerah dengan cara penyesuaian tarif, perbaikan sistem pelayanan, penerbitan objek-objek dan pengenaan sistem denda bagi penunggak. Ekstensifikasi dilakukan untuk menambah sumber-sumber baru yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disintesis menurut Sahya Anggara (2016:326) adalah: “Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dihasilkan dari upaya daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan studi deskriptif atau disebut sebagai penelitian deskriptif kuantitatif., yaitu penelitian yang suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang diketahui. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Teknik *Sampling Jenuh dengan* menggunakan data sekunder Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diaudit oleh BPK dan Laporan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan yang dianalisis

menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan *Software Statistical Product for the Service Solution (SPSS)* versi 26 for windows. Metode penelitian ini dipilih oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana pengaruh Efisiensi, Efektivitas, Kontribusi, Laju Pertumbuhan Penerimaan, dan Pertumbuhan Wajib Pajak terhadap PAD baik secara parsial maupun secara simultan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Berganda

Hasil regresi berganda disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11,005	1,031		10,674	,000		
	Efisiensi	,571	,052	,932	11,056	,000	,289	3,460
	Efektivitas	,188	,035	,305	5,339	,000	,963	1,038
	Kontribusi	-,496	,100	-,542	-4,956	,000	,263	3,808
	P.Realisasi	,148	,041	,219	3,638	,000	,870	1,150
	P.WajibPajak	,228	,060	,224	3,826	,000	,919	1,088

Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi berganda hasilnya sebagai berikut:

$$Y = 11,005 + 0,932 \beta_1 X_1 + 0,305 \beta_1 X_2 - 0,542 \beta_1 X_3 + 0,219 \beta_1 X_4 + 0,224 \beta_1 X_5$$

1. Nilai konstanta (α) sebesar 11,005 menunjukkan bahwa apabila variabel efisiensi, efektivitas, kontribusi, laju pertumbuhan penerimaan, pertumbuhan wajib pajak bernilai 0 (nol) maka PAD sebesar 11,005.
2. Nilai koefisien regresi variabel efisiensi sebesar 0,932 dan bernilai positif, artinya jika nilai variabel efisiensi naik sebesar 1 maka nilai PAD akan naik sebesar 0,932 dengan asumsi variabel independen/bebas lain nilainya tetap.
3. Nilai koefisien regresi variabel efektivitas sebesar 0,305 dan bernilai positif, artinya jika nilai variabel efektivitas naik sebesar 1 maka nilai PAD akan naik sebesar 0,305 dengan asumsi variabel independen/bebas lain nilainya tetap.
4. Nilai koefisien regresi variabel kontribusi sebesar 0,542 dan bernilai negatif, artinya jika nilai variabel kontribusi sebesar 1 maka nilai PAD akan turun sebesar 0,542 dengan asumsi variabel independen/bebas lain nilainya tetap.
5. Nilai Koefisien regresi variabel laju pertumbuhan penerimaan sebesar 0,219 dan bernilai positif, artinya jika nilai variabel laju pertumbuhan penerimaan naik sebesar 1 maka nilai PAD akan naik sebesar 0,219 dengan asumsi variabel independen/bebas lain nilainya tetap.
6. Nilai koefisien regresi variabel pertumbuhan wajib pajak sebesar 0,224 dan bernilai positif, artinya jika nilai variabel pertumbuhan wajib pajak sebesar 1 maka nilai PAD

akan naik sebesar 0,224 dengan asumsi variabel independen/bebas lain nilainya tetap. Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)
 Ringkasan hasil pengujian koefisien determinasi disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,858 ^a	,736	,721	,27310

a. Predictors: (Constant), X5, X4, X2, X1, X3

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah nilai *Adjusted R Square* yang ada pada tabel 2 diatas. Hasil perhitungan statistik diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,721 yang menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel Efisiensi (X_1), Efektifitas (X_2), Kontribusi (X_3), Laju Pertumbuhan Penerimaan (X_4), dan Pertumbuhan Wajib Pajak (X_5) terhadap PAD (Y) karena nilainya mendekati 1. Nilai nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,721, hal ini berarti 72,1% PAD dapat dijelaskan oleh Efisiensi (X_1), Efektifitas (X_2), Kontribusi (X_3), Laju Pertumbuhan Penerimaan (X_4), dan Pertumbuhan Wajib Pajak (X_5) dari kelima variabel independen. Sedangkan sisanya ($100\% - 72,1\% = 27,9\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

Kesimpulan Dan Saran

Hasil yang diperoleh nilai t_{12344} -hitung $>$ t-tabel 1,66320 dan P-Value sebesar 0,000 $<$ 0,05. Artinya variabel Efisiensi (X_1), Efektifitas (X_2), Kontribusi (X_3), Laju Pertumbuhan Penerimaan (X_4), dan Pertumbuhan Wajib Pajak (X_5) berpengaruh terhadap PAD (Y) secara parsial. Hasil yang diperoleh nilai F-hitung 46,894 $>$ nilai F-tabel 2,32 dan P Value sebesar 0,000 $<$ 0,05 yang berarti variabel independen secara bersama-sama mempunyai hubungan dengan variabel dependen. Artinya variabel Efisiensi (X_1), Efektifitas (X_2), Kontribusi (X_3), Laju Pertumbuhan Penerimaan (X_4), dan Pertumbuhan Wajib Pajak (X_5) berpengaruh secara bersama-sama terhadap PAD (Y).

DAFTAR PUSTAKA

- Baldric Siregar. 2017, Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Beni, 2016, Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi (Jakarta: Taushia, 2016)
- Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, 2010, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 161
- Mahsun, 2016, Pengukuran Kinerja Sektor Publik (BPFE : Yogyakarta., 2016)
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo, 2017, Perpajakan Edisi Terbaru. (Yogyakarta: ANDI. 2017)
- Raudhatun Wardani dan Wida Fadhliha, 2017, “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 2, No.3, (2017), hal 10-17 (ISSN 2581-1002)

- Halim, 2016, Manajemen Keuangan Sektor Publik. (Salemba Empat: Jakarta 2016)
- Widodo, 2016, Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori, Perencanaan. Strategi,Isu-isu Utama (Bandung: Manggu Media 2016)
- Kasmir. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik). Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Wahyu Suryani, Maslichah, &Junaidi, 2019, Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 Menjadi PP 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) DI KPP Pratama Pasuruan. Jurnal E JRA Vol. 08 No. 02
- Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)
- Thomas Sumarsan, 2017, Perpajakan Indonesia Edisi Kelima. Jakarta: Indeks